

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN TERHADAP PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN BENTENG SAWITTO KECAMATAN PALETEANG KABUPATEN PINRANG

The Effectiveness of Village Fund Management on Infrastructure Improvement in Benteng Sawitto Village Paleteang District Pinrang Regency

Yusri Mahendra¹, Muhammad Hatta², Bahrudin³

Email : yusrimahendra176@gmail.com

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl.Jend.Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91113

Abstract

The increasing economic growth will drive a high level of community mobility, which demands the fulfillment of adequate transportation facilities and infrastructure to support such growth. However, in reality, this infrastructure still falls short of expectations. This research aims to identify and analyze the effectiveness of the Kelurahan Fund Management in Benteng Sawitto Village, Paleteang District, Pinrang Regency. The study is designed as qualitative research by examining the effectiveness of village fund management in improving infrastructure. In this research, the sources of data (informants) include the Head of Benteng Sawitto Village, the Head of Development in Benteng Sawitto, the Head of Community Welfare in Benteng Sawitto, the Financial Manager of Benteng Sawitto, the Chairman of the LKK Benteng Sawitto, and the community of Benteng Sawitto. This research produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior. The research results indicate that the indicators of Clarity of Objectives, Clarity of Strategies to Achieve Objectives, Robust Policy Analysis and Formulation Process, Mature Planning, Accurate Program Development, Availability of Facilities and Infrastructure, Effective and Efficient Implementation, and Supervision and Control System have all been effectively implemented, both by the Village Administration and the LKK.

Keywords: Effectiveness, Fund Management

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi yang kian mengikat akan mendorong tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi yang menuntut terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi yang layak untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Namun kenyataan yang ada, infrastruktur tersebut masih jauh dari harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Penelitian ini di desain sebagai suatu penelitian kualitatif dengan mengkaji efektivitas pengelolaan dana kelurahan terhadap peningkatan infrastruktur. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data (informan), adalah Kepala Kelurahan Benteng Sawitto, Kasi Pembangunan Benteng Sawitto, Kasi Kesejahteraan Masyarakat Benteng Sawitto, Pengelola Keuangan Benteng Sawitto, Ketua LKK Benteng Sawitto, dan masyarakat Benteng Sawitto. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam indikator Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai, Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan, Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang mantap, Perencanaan yang Matang, Penyusunan Program yang Tepat, Tersedianya Sarana dan Prasarana, Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien, dan Sistem Pengawasan dan Pengendalian telah berjalan dengan efektif baik itu dari pihak Kelurahan maupun dari pihak LKK.

Kata kunci : Efektivitas, Pengelolaan Dana

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa tujuan pembangunan yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Pembangunan sebagai proses perubahan yang terencana yang melibatkan peran negara dan terjadi pada kehidupan masyarakat. Pembangunan adalah suatu proses reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi serta sosial dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu dengan meningkatnya pendapatan. Keberhasilan dalam pembangunan diukur dari besarnya kemauan dan kemampuan untuk mandiri, yaitu adanya kemauan masyarakat untuk menciptakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan merupakan aspek penting dalam mewujudkan cita-cita konstitusi, keadilan sosial terhadap unsur pemerataan pembangunan. (Muhammad Zainul Abidin, 2015)

Indonesia adalah merupakan negara hukum, yang berarti segala sesuatu yang menyangkut kehidupan masyarakatnya sebisa mungkin diatur dalam sebuah aturan yang sudah dikodifikasi, walaupun di sisi lain hukum Indonesia juga masih menghormati hukum adat. Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini juga muncul untuk mengurai polemik mengenai dana kelurahan.

Kelurahan adalah merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga bisa dikatakan bahwa keberhasilan dalam menjalankan pembangunan tergantung dari bagaimana efektivitas pengelolaan dan pelaksanaannya dan juga bagaimana partisipasi masyarakat setempat ikut dalam perencanaan pembangunan. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi mengusulkan apa saja yang perlu dibenahi dalam urusan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan.

Keberadaan kelurahan secara yuridis formal diakui di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Kelurahan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan. Konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Kelurahan adalah merupakan unit pemerintahan terkecil yang setingkat dengan Desa. Kelurahan mempunyai sumber keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten yang dialokasikan, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Bantuan pihak ketiga dan juga sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pembangunan akan dikatakan berhasil jika bisa membawa perubahan kesejahteraan di masyarakat sehingga proses pembangunan merupakan proses tawar-menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah, hal ini terlihat dalam proses perencanaan pembangunan yang dikenal dengan istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam penyelenggaraan Musrenbang ini sebetulnya adalah terjadinya pepaduserasian antara pendekatan yang *top down* dimiliki oleh instansi sektoral dan pendekatan *bottom* yang diimani oleh instansi daerah berdasarkan usulan masyarakat dengan melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbanglur) dan temu karya pembangunan. Dalam prakteknya forum ini lebih bersifat pemangkasan usulan atau keinginan masyarakat oleh instansi pemerintah di atasnya, dengan alasan prioritas dan ketersediaan dana, (Sudriamunawar, 2002).

Rencana pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dibuat berdasarkan usulan-usulan dan permintaan dari berbagai elemen masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan masyarakat yang kebanyakan menginginkan pembangunan fisik agar lebih

ditingkatkan. Sehingga, pada akhirnya pembangunan fisik sedikit lebih diprioritaskan dari pada kegiatan non fisik dikarenakan keadaan Kelurahan Benteng Sawitto walaupun berdekatan dengan wilayah Ibu Kota Kabupaten tetapi infrastrukturnya masih sedikit kurang memadai terutama infrastruktur jalan.

Kelurahan Benteng Sawitto sendiri didominasi oleh kawasan pertanian utamanya dibidang persawahan. Beberapa tahun terakhir sebagian wilayah persawahan dirubah menjadi lokasi perumahan dikarenakan para pemilik lahan persawahan itu menjual lahan mereka. Berawal dari itu banyak rumah-rumah warga yang akses jalannya tidak begitu baik karena lokasi yang dulunya adalah kawasan persawahan, dan juga saluran air di area itu belum ada sehingga ketika volume hujan meningkat sering terjadi genangan air yang bisa mengakibatkan banjir. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pihak Kelurahan Benteng Sawitto dalam mengatasi hal tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang kian mengikat akan mendorong tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi yang menuntut terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi yang layak untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Namun kenyataan yang ada, infrastruktur tersebut masih jauh dari harapan. Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sebagai salah satu Kelurahan yang terletak di wilayah timur Kabupaten Pinrang belum seluruhnya menyediakan prasarana transportasi yang layak dan memadai. Masih ada beberapa titik lokasi di wilayah Kelurahan Benteng Sawitto yang layak menjadi prioritas pembangunan infrastruktur yaitu prasarana jalan berupa rabat beton dan drainase.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengkaji efektivitas pengelolaan dana kelurahan terhadap peningkatan infrastruktur. Penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Kelurahan Benteng Sawitto dipilih karena Kelurahan ini menjadi lokasi dimana saya melakukan magang MBKM tepatnya di kantor Kelurahan Benteng Sawitto selama kurang lebih dua bulan. Informan dalam penelitian ini, yaitu Kepala Kelurahan Benteng Sawitto, Kasi Pembangunan Benteng Sawitto, Kasi Kesejahteraan Masyarakat Benteng Sawitto, Pengelola Keuangan Benteng Sawitto, Ketua LKK Benteng Sawitto, dan masyarakat Benteng Sawitto. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dan observasi, teknik analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif, Analisis data dalam kualitatif dilakukan sejak sebelum dilapangan dan setelah selesai dilapangan.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan tentu jumlahnya banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci serta di kategorisasikan agar mudah disajikan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema serta polanya. Reduksi data juga diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami dan data tersebut biasanya akan disajikan baik dalam bentuk narasi, bagan, grafik, hubungan antar variabel, dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah menjadi absah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Untuk mengukur bagaimana efektivitas pengelolaan dana Kelurahan Benteng Sawitto terhadap peningkatan infrastruktur peneliti menggunakan indikator S.P. Siagian (2002), indikator efektivitas kerja adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan Tujuan Yang Hendak Dicapai.

Dalam hal ini hasil dari Musrenbang Kelurahan di jadikan sebagai acuan yang jelas untuk melakukan pembangun. Sehingga pengelolaan dananya bisa berjalan dengan baik bagi peningkatan infrastruktur Kelurahan. Jika tujuannya jelas maka pembangunan infrastruktur Kelurahan dapat mencapai target dan tepat sasaran sesuai dengan apa yang di butuhkan masyarakat.

Tujuan yang jelas dalam hal ini adalah peningkatan infrastruktur Kelurahan yang mengarah pada pembangunan fisik Kelurahan. Pembangunan fisik Kelurahan sudah jelas telah di musyawarahkan di dalam Musrenbang Kelurahan sebagaimana telah di ungkapkan oleh Kasi Kesejahteraan Masyarakat, yakni :

“Sudah pasti jelas, karena itu merupakan daftar usulan yang sudah disepakati dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan yang di prioritaskan dalam pembangunan Kelurahan.” (wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2023)

Dari dalam hasil Musrenbang terdapat banyak usulan-usulan yang sudah disepakati dari berbagai elemen-elemen masyarakat yang akan menjadi prioritas dalam melakukan pembangunan fisik Kelurahan Benteng Sawitto. Dengan begitu peningkatan infrastruktur kelurahan akan berjalan dengan baik sesuai apa yang masyarakat butuhkan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Pengelola Keuangan, beliau mengatakan bahwa :

“Iya, sudah jelas, yaitu untuk menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat.” (wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2023)

Dalam musrenbang dilakukan pembicaraan mengenai masalah dan potensi Kelurahan agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atas tindakan yang layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah Kelurahan melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan Kelurahan.

Dalam Musrenbang ini tujuannya sudah jelas untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat dan menetapkan skala prioritas kebutuhan masyarakat baik dalam pembangunan maupun pemberdayaan. Jika tujuannya sudah jelas maka pengelolaan dana kelurahan dapat berjalan dengan baik.

Dilaksanakannya model perencanaan partisipatif di tingkat Kelurahan yang melibatkan semua komponen masyarakat, lembaga kemasyarakatan, swasta dan pemerintah Kelurahan/lembaga pemerintah lainnya yang ada di Kelurahan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Kelurahan Benteng Sawitto, beliau mengatakan bahwa :

“Setelah Musrenbang selesai dan sudah ada hasilnya, nanti hasilnya itu yang akan di laksanakan sesuai kesepakatan.” (wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2023)

Hasil dari Musrenbang akan menjadi tahap awal dari proses penentuan program penganggaran yang akan di kelola oleh Kelurahan yang mana anggarannya nanti akan disesuaikan dengan hasil dari Musrenbang.

2. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan.

Strategi yang jelas dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur Kelurahan dapat mencapai sasaran yang ditentukan. Jika strateginya jelas besar kemungkinan pengelolaannya akan efektif. Hasil dari pengamatan peneliti menunjukkan bahwa Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang menjadikan Musrenbang sebagai wadah untuk menjelaskan strategi yang akan di pakai dalam mencapai tujuan dari pembangunan infrastruktur Kelurahan.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kasi Kesejahteraan Masyarakat Benteng Sawitto, beliau mengatakan bahwa :

“Ya, karena Musrenbang adalah wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik dan saran dari program pemerintah.” (wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2023)

Selain untuk menyampaikan rencana pembangunan Kelurahan, Musrenbang juga dapat dijadikan tempat untuk menyampaikan kritik dan saran untuk pemerintah. Di samping itu pelaksanaan Musrenbang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peneliti melihat gambaran yang dihasilkan dalam menentukan strategi di dalam Musrenbang seperti melakukan pencatatan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kelurahan yang akan di biayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan melakukan pencatatan masalah yang menjadi persoalan/kewenangan daerah berupa usulan program atau kegiatan yang akan di ajukan pembiayaan melalui APBD Kabupaten.

Hal senada disampaikan oleh Pengelola Keuangan, beliau mengatakan bahwa :
"Iya sudah jelas, yaitu untuk menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan Masyarakat" (**wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2023**)

Dengan menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat, penyusunan strategi untuk peningkatan infrastruktur di Kelurahan akan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Kantor Kelurahan Benteng Sawitto sudah memenuhi salah satu indikator kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan hal ini dapat dikatakan oleh peneliti karena strategi yang digunakan dalam pencapaian tujuan sudah jelas dan terkandung didalam misi yang dijalankan oleh Kantor Kelurahan Benteng Sawitto antara lain meningkatkan pembangunan.

Pembangunan infrastruktur Kelurahan dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), dana tersebut sangat Penting bagi Kelurahan Benteng Sawitto karena berkat adanya Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan Benteng Sawitto Mengalami peningkatan pembangunan. Pentingnya Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Kelurahan di ungkapkan oleh Pengelola Keuangan Benteng Sawitto, beliau mengungkapkan bahwa :

"Dana Alokasi Umum ini sangat penting bagi Kelurahan, karena dengan dana tersebut lah dilakukan pembangunan" (**wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2023**)

Seperti yang di ungkapkan oleh Pengelola Keuangan Dana Alokasi Umum (DAU) ini sangat berpengaruh bagi peningkatan pembangunan Kelurahan Benteng Sawitto, hal serupa di ungkapkan oleh Kasi Kesejahteraan Masyarakat Benteng Sawitto, beliau mengungkapkan :

"Pentingnya DAU bagi Kelurahan adalah dapat meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah" (**wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2023**)

Seperti yang di ungkapkan oleh Kasi Kesejahteraan Masyarakat Benteng Sawitto bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) ini selain penting dalam peningkatan pembangunan Kelurahan disisi lain juga penting bagi pelayanan publik dan kemajuan perekonomian daerah.

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.

Perumusan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Kelurahan Benteng Sawitto yang sebelum merumuskan suatu kebijakan selalu didasari dari adanya analisis dan melihat dari pengalaman sebelumnya sehingga suatu kebijakan yang dibuat tidak hanya asal saja dirumuskan.

Tapi Kepala Kelurahan perlu melakukan rapat terkait dengan kebijakan yang dibuat dengan Kepala Seksi yang berhubungan nantinya terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan karena kebijakan yang dibuat memerlukan analisis dan perumusan kebijakan yang penting sehingga nantinya kebijakan yang dibuat tidak mengganggu kinerja para pegawai atau mengurangi optimalisasi pekerjaan yang sudah baik dilakukan para pegawai yang bersentuhan langsung dengan kebijakan yang dibuat.

Maka dari itu selalu ada analisis dan kajian yang lebih dalam sebelum mengeluarkan kebijakan bagi kelangsungan atau kemajuan perangkat Kelurahan Benteng Sawitto. Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu melakukan pembangunan yang tepat sasaran dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional Kelurahan.

Dalam hal ini peneliti bertanya kepada Kepala Kelurahan Benteng Sawitto tentang kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan fisik Kelurahan, beliau mengatakan bahwa :

"Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik ini di jalankan oleh LKK, kami dari pihak kelurahan hanya sebatas perantara saja" (**wawancara dilakukan pada tanggal 18 Januari 2023**)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Benteng Sawitto itu dijalankan oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) diberikan wewenang dalam melaksanakan pembangunan fisik Kelurahan. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat, yang memiliki tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Peneliti selanjutnya memberikan pertanyaan kepada Kasi Pembangunan Benteng Sawitto tentang penetapan LKK sebagai pelaksana kegiatan, beliau mengungkapkan bahwa :
“Sebelum penetapan LKK sebagai pelaksana kegiatan, kami melakukan rapat dulu yang dihadiri Tokoh masyarakat, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, dan para Kepala lingkungan, setelah itu disepakati lah LKK sebagai pelaksana kegiatan”
(wawancara dilakukan pada tanggal 18 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa LKK tidak semata-merta dipilih karena harus diadakan rapat terlebih dahulu, dari hasil rapat itulah disepakati LKK ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara Kepada Ketua LKK Benteng Sawitto mengenai pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik Kelurahan, beliau mengungkapkan bahwa :

“...benar kami yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan untuk menjalankan proyek-proyek sesuai dari hasil musrenbang kelurahan,” **(wawancara dilakukan pada tanggal 18 Januari 2023)**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua LKK Benteng Sawitto bahwa memang LKK yang ditetapkan untuk menjalankan semua proyek pembangunan fisik Kelurahan, yang mana proyek-proyek ini yang dirumuskan pada saat Musrenbang.

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan tentang pengaruh kebijakan yang mana kebijakan itu merujuk ke LKK yang menjalankan kegiatan pembangunan fisik kelurahan kepada Kepala Kelurahan Benteng Sawitto, beliau mengatakan :

“Kebijakan seperti ini dapat mempengaruhi keefektifan pengelolaan dana Kelurahan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan itu pada Musrenbang, kami juga sangat terbantu dengan LKK yang menjalankan proyek ini” **(wawancara dilakukan pada tanggal 18 Januari 2023)**

Kebijakan yang telah diambil dalam hal ini LKK sebagai pelaksana kegiatan dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana Kelurahan sesuai yang di sampaikan oleh Kepala Kelurahan Benteng Sawitto. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap dapat mempengaruhi keefektifan pengelolaan dalam mencapai tujuan karena yang menentukan maju dan mundurnya suatu organisasi itu ditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang mantap dan tidak menutup kemungkinan kebijakan yang telah dijalankan akan berdampak bagi kemajuan organisasi.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Pengelola Keuangan Benteng Sawitto, beliau mengungkapkan bahwa :

“Adanya LKK dalam menjalankan proyek Kelurahan kami merasa terbantu dengan hal itu, jadi kami bisa mengelola dana pemberdayaan saja” **(wawancara dilakukan pada tanggal 18 Januari 2023)**

Berdasarkan jawaban dari Pengelola Keuangan Benteng Sawitto bahwa perumusan dan analisis kebijakan yang mantap sangat membantu dalam mengelola keuangan. Dalam hal ini kebijakan yang dimaksud adalah LKK sebagai pelaksana kegiatan.

Peneliti melihat analisis dan perumusan kebijakan pada Kantor Kelurahan Benteng Sawitto sudah berjalan baik hal itu di dasarkan oleh belum adanya permasalahan di dalam lingkup internal para pegawai kantor Kelurahan Benteng Sawitto.

4. Perencanaan Yang Matang.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dimana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan. Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun

anggaran yang direncanakan. Musrenbang Kelurahan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan.

Dalam hal ini peneliti mencoba menanyakan bagaimana pentingnya Musrenbang dikarenakan dana pembangunan fisik yang akan dikelola mengacu dari hasil Musrenbang. Peneliti kemudian memberikan pertanyaan kepada Pengelola Keuangan Benteng Sawitto tentang bagaimana pentingnya pelaksanaan Musrenbang, beliau mengatakan bahwa :

“Sangat penting, karena dalam musrenbang itulah, masyarakat dapat menyampaikan usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan”
(wawancara dilakukan pada tanggal 18 Januari 2023)

Perencanaan yang matang dalam hal ini dilakukan dalam forum Musrenbang yang akan menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat dan menetapkan prioritas kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Kemudian peneliti mencoba memberikan pertanyaan kepada Kasi Pembangunan Benteng Sawitto tentang bagaimana pentingnya pelaksanaan Musrenbang, beliau berpendapat bahwa :

“Sangat penting karena dengan adanya Musrenbang, itu sebagai bentuk proses perencanaan pembangunan dan untuk menyampaikan aspirasi dan kritik maupun saran-saran demi untuk mencapai kesepakatan dan pembangunan di daerah tersebut.”
(wawancara dilakukan pada tanggal 18 Januari 2023)

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dari kedua informan yaitu Pengelola Keuangan Benteng Sawitto dan Kasi Pembangunan Benteng Sawitto memberikan jawaban yang senada tentang bagaimana pentingnya Musrenbang, bisa dikatakan bahwa perencanaan yang matang dilakukan dalam Musrenbang Kelurahan.

5. Penyusunan Program Yang Tepat.

Suatu rencana yang baik tetap perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana kegiatan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. Sejalan dengan indikator sebelumnya yakni perencanaan yang matang maka suatu organisasi memerlukan suatu program yang tepat agar organisasi itu dapat berjalan dan berkembang.

Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ketua LKK Benteng Sawitto beliau mengatakan bahwa :

“Pengelolaan dana Kelurahan bisa saja mengalami kendala jika tidak ada pedoman atau pendampingan dalam penyusunan/pelaksanaan dan pelaporan. Namun kami di sini berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Kelurahan sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan lancar”
(wawancara dilakukan pada tanggal 19 Januari 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana Kelurahan tidak mudah dilakukan tanpa adanya bantuan dari pihak Kelurahan dan mesti berkaca pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, jika tidak bisa saja dapat terjadi kendala dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik. Namun seperti yang dikatakan oleh ketua LKK Benteng Sawitto pelaksanaan kegiatannya berjalan lancar.

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh LKK Benteng Sawitto berjalan lancar dan tanpa ada kendala.

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan kepada Kepala Kelurahan Benteng Sawitto mengenai program yang dijalankan, beliau mengungkapkan bahwa :

“Program-program yang kami jalankan ini kami sesuaikan dengan misi Kelurahan, salah satunya meningkatkan pembangunan”
(wawancara dilakukan pada tanggal 19 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kantor Kelurahan Benteng Sawitto sudah memiliki program-program dalam pembangunan Kelurahan yang di hasilkan dari Musrenbang yang di kandung dalam visi dan misi Kantor Kelurahan Benteng Sawitto, hal ini dapat dilihat dari program yang dibuat seperti pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman serta pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat Kelurahan Benteng Sawitto dan menanyakan tentang program-program pembangunan fisik di Kelurahan Benteng Sawitto ini, beliau mengatakan bahwa :

“Program pembangunannya ya sudah tepat sasaran, berjalan baik juga sesuai yang dibutuhkan masyarakat” (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Januari 2023)

Dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu masyarakat Kelurahan Benteng Sawitto dapat disimpulkan bahwa program-program yang dijalankan Kelurahan sudah tepat sasaran dan sudah sesuai dengan apa yang di butuhkan masyarakat.

6. Tersedianya Sarana Dan Prasarana.

Sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif. Dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan, adanya sarana dan prasarana tentunya sangat membantu kelancaran serta efisiensi prosesnya. Dalam hal ini sarana dan prasarana dibutuhkan untuk mempermudah pengelolaan dana Kelurahan dalam meningkatkan infrastruktur Kelurahan. Selain mempermudah adanya sarana dan prasarana juga bisa mempercepat proses pengelolaan dana Kelurahan.

Dalam hal ini peneliti kemudian melakukan wawancara kepada ketua LKK Benteng Sawitto mengenai sarana dan prasarana apa saja yang digunakan dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan kegiatannya, beliau mengungkapkan bahwa :

“sarana dan prasarana yang di pakai itu seperti laptop printer, wifi dan alat tulis kantor. Itu kami pakai untuk pengadministrasian seperti pembuatan laporan pertanggung jawaban. Kami juga memakai molen cor dan papan kayu dalam pelaksanaan proyek-proyeknya” (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Januari 2023)

Dalam hal ini LKK Benteng Sawitto hanya menggunakan sarana dan prasarana seperti laptop, printer, wifi, dan alat tulis kantor yang digunakan untuk melakukan pembuatan laporan pertanggung jawaban dan administrasi lainnya. Kemudian sarana dan prasarana yang digunakan dalam menjalankan proyeknya seperti molen cor dan papan kayu.

Peneliti melihat sarana dan prasarana yang dipakai itu tidak begitu banyak dikarenakan proyek-proyek yang dijalankan itu tidak begitu besar, sehingga sarana dan prasarana yang digunakan tidak sebanyak proyek-proyek besar. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Kelurahan Benteng Sawitto, beliau mengungkapkan bahwa :

“Proyek-proyek yang selama ini dijalankan Kelurahan itu bukan proyek besar, jadi tidak membutuhkan banyak sarana dan prasarana, intinya jika sudah ada laptop atau komputer, printer, jaringan yang mendukung, ATK, dan alat yang dipakai untuk mengerjakan proyek, itu sudah mampu menunjang proses pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan agar berjalan dengan efektif” (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Januari 2023)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengelolaan dana kelurahan untuk pembangunan fisik walaupun tidak begitu banyak sudah bisa berjalan dengan baik.

7. Pelaksanaan Yang Efektif Dan Efisien.

Apabila suatu program tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi agar supaya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sehingga mencapai hasil yang baik.

Efektivitas dapat terealisasi disini maksudnya keefektifan pengelolaan dana Kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Peneliti kemudian melakukan wawancara kepada Kasi Pembangunan Benteng Sawitto mengenai bagaimana pelaksanaan pembangunan fisik Kelurahan, beliau mengungkapkan bahwa :

“Setelah di tetapkannya LKK sebagai pelaksana kegiatan kemudian saya buatlah SK Penetapan tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang ditanda tangani oleh Pak Lurah” (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Januari 2023)

Setelah LKK ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan kemudian Kasi Pembangunan Benteng Sawitto membuat SK penetapan yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Benteng Sawitto.

Kemudian peneliti kembali memberikan pertanyaan kepada Kasi Pembangunan Benteng Sawitto tentang bagaimana tahap selanjutnya setelah penetapan LKK sebagai pelaksana kegiatan, beliau mengungkapkan bahwa :

“Setelah penetapan LKK, kemudian dibuatkanlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh konsultan sebagai acuan pengelolaan dananya” (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Januari 2023)

Dalam hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setelah penetapan LKK sebagai pelaksana kegiatan kemudian dibuatlah Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB ini adalah sebuah perkiraan biaya untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas bisnis, proyek, dan lainnya. Peneliti kemudian kembali memberikan pertanyaan kepada Kasi Pembangunan tentang bagaimana pentingnya RAB ini dalam pengelolaan dana Kelurahan, beliau mengatakan bahwa :

“RAB ini sendiri membantu untuk memproyeksikan berapa dana yang akan diperlukan serta apa saja yang diperlukan, juga bisa memperkecil resiko pada saat menjalankan proyek” (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Januari 2023)

Adanya RAB ini akan memperkecil resiko dalam menjalankan suatu proyek, ini karena sudah ada rencana yang dirancang yang dapat menjadi patokan. Di dalam RAB biasanya ada rencana anggaran bahan baku, upah dan biaya lainnya. Hal senada diungkapkan oleh ketua LKK Benteng Sawitto, beliau mengungkapkan bahwa :

“Fungsi RAB ini adalah memastikan pelaksanaan operasional kelurahan dapat berjalan dengan baik, juga ini bisa menjadi acuan dan pedoman dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasional kelurahan” (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Januari 2023)

RAB membantu LKK dalam mengelola dana pembangunan fisik seperti memproyeksi berapa dana yang diperlukan untuk menjalankan proyek Kelurahan. Dana yang dikeluarkan oleh LKK untuk pembelian bahan-bahan pengerjaan proyek tidak lepas dari RAB sehingga pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik. Setelah RAB selesai dibuat maka LKK sudah bisa memulai menjalankan proyek pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan.

Dalam hal ini peneliti kembali memberikan pertanyaan kepada ketua LKK Benteng Sawitto tentang bagaimana tahap awal sampai tahap akhir dalam mengerjakan proyek tersebut, beliau mengungkapkan bahwa :

“Pekerjaannya dikerjakan sesuai RAB, tahap awal itu kami melakukan pemeriksaan lapangan dulu, kemudian pengadaan papan proyek dan pekerjaan administrasi dan dokumentasi. Kemudian tahap pekerjaan dilakukan pembersihan terlebih dahulu, membongkar dan meratakan lahan dasarnya, pengukuran dan pemasangan patok penanda, menyiapkan alat dan bahan lalu kemudian pengecoran dan setelah itu pemasangan prasasti. Tahap akhir kami melakukan pembersihan material pekerjaan” (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Januari 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti menyimpulkan bahwa tahap awalnya dimulai dengan melakukan pemeriksaan lapangan, lalu disediakan lah papan proyek kemudian pekerjaan administrasi dan dokumentasinya. Setelah tahap awal kemudian dimulai lah pekerjaan fisik, dimulai dari pembersihan, pembongkaran dan perataan lahan dasar, lalu pengukuran dan pemasangan patok penanda dan menyiapkan alat dan bahan.

Setelah itu pemasangan tulangan besi dan pengecoran lalu pemasangan prasasti. Kemudian memasuki tahap akhir pekerjaan akan dilakukan pembersihan material pekerjaan.

8. Sistem Pengawasan Dan Pengendalian.

Pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Monitoring, pelaporan dan evaluasi adalah termasuk ke dalam tahap pengawasan dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan. Dalam melakukan

pengawasan, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat dan dibantu oleh inspektorat kabupaten.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada ketua LKK Benteng Sawitto tentang bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait. Ketua LKK mengungkapkan bahwa :

“setelah proyek selesai kemudian turun lah pihak kecamatan memonitoring dan melakukan pengukuran untuk memastikan proyek sudah sesuai dengan RAB”
(wawancara dilakukan pada tanggal 20 Januari 2023)

Setelah proyeknya selesai Camat Paleteang atau yang mewakili akan turun ke lapangan untuk meninjau bagaimana hasil dari proyek tersebut dan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Dalam hal ini Kepala Kelurahan Benteng Sawitto memberikan pendapat yang senada, beliau mengungkapkan bahwa :

“Pihak Kecamatan nantinya akan turun melakukan monitoring, dan saya beserta LKK akan ikut mendampingi, dari hasil monitoring itu semuanya berjalan baik, dan untuk laporan pelaksanaan kegiatan diserahkan ke Bupati melalui camat, jadi nanti kami dari pihak kelurahan yang bawa ke camat” **(wawancara dilakukan pada tanggal 20 Januari 2023)**

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa memang pengawasannya dilakukan oleh Camat Paleteang dan di dampingi Lurah Benteng Sawitto dan Ketua LKK selaku pelaksana kegiatan. Kemudian untuk laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan akan di sampaikan kepada Bupati melalui Camat Paleteang.

Kemudian peneliti kembali memberikan pertanyaan kepada Kepala Kelurahan Benteng Sawitto mengenai pengendalian yang dilakukan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan ini, beliau mengungkapkan bahwa :

“Bentuk pengendalian yang dilakukan itu sama halnya ketika saya datang memantau pelaksanaan proyek yang sedang berjalan dan alhamdulillah pelaksanaan proyek berjalan baik tanpa ada kendala berarti” **(wawancara dilakukan pada tanggal 20 Januari 2023)**

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Benteng Sawitto dapat disimpulkan bahwa beliau lah yang melakukan pengendalian dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan. Dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik tanpa menemui kendala yang berarti.

B. Pembahasan

Penelitian ini telah memaparkan data tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Terhadap Peningkatan Infrastruktur di Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Kemudian peneliti akan mencoba menghubungkan tumuan dari hasil penelitian di lapangan dengan dasar yang telah di tetapkan sejak awal tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Terhadap Peningkatan Infrastruktur di Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

Dengan menggunakan teori dari Sondang P. Siagian (2002) yaitu, kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, menyusun program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, pelaksanaan yang efektif dan efisien, dan sistem pengawasan dan pengendalian.

1. Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai

Dalam hal kejelasan tujuan yang hendak dicapai adalah peningkatan pembangunan infrastruktur Kelurahan Benteng Sawitto semuanya telah dipaparkan di dalam Musrenbang. Tujuan yang hendak dicapai juga terangkum dalam misi Kelurahan salah satunya meningkatkan pembangunan.

Pihak Kelurahan telah mencapai indikator kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dapat dilihat dari bagaimana hasil musrenbang yang telah sesuai dengan pembangunan yang telah dijalankan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan-tujuan yang diinginkan dalam musrenbang sudah jelas karena sudah terealisasi dengan baik.

2. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Kejelasan strategi pencapaian tujuan adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar supaya memungkinkan memperoleh hasil yang optimal dan efektif dan dalam jangka waktu yang relatif singkat, serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (Hasibuan, 1996)

Dalam hal kejelasan strategi pencapaian tujuan pihak Kelurahan telah melakukan rapat untuk menetapkan LKK sebagai pelaksana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, sehingga pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur kelurahan telah berjalan dengan baik dan tanpa ada kendala yang berarti, sesuai yang disampaikan oleh ketua LKK Benteng Sawitto selaku pelaksana kegiatan.

Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa pihak Kelurahan telah memenuhi salah satu indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan hal ini dapat dikatakan oleh peneliti karena strategi yang digunakan oleh pihak Kelurahan yang menetapkan LKK sebagai pelaksana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sudah menjalankan tugas dengan baik.

3. Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang Mantap

Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap dalam hal ini adalah ditetapkannya LKK sebagai pelaksana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan. Kemudian Kepala Kelurahan Benteng Sawitto menunjuk konsultan agar melakukan analisis dan perumusan untuk memastikan pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik.

Proses analisis dan perumusan yang dilakukan oleh konsultan yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan Benteng Sawitto disebut sebagai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dengan adanya RAB sebagai patokan sehingga proses pengelolaan dana dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Benteng Sawitto berjalan dengan lancar.

4. Perencanaan yang Matang

Perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan (Hasibuan 2007). Dalam perencanaan yang matang ini dilakukan dalam forum Musrenbang, perencanaan yang partisipatif diwujudkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dimana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan.

Dalam hal ini semua usulan-usulan pembangunan, baik saran maupun kritik yang disampaikan oleh semua pemangku kepentingan yang hadir akan menjadi bahan evaluasi bagi pihak Kelurahan sehingga kedepannya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Benteng Sawitto akan terus meningkat.

5. Penyusunan Program yang Tepat

Penyusunan program yang tepat juga telah dirumuskan di dalam Musrenbang Kelurahan dimana program-program yang paling di prioritaskan dan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yang akan ditetapkan sebagai sasaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Benteng Sawitto ini.

Dalam hal ini program-program pembangunan yang telah dijalankan dalam meningkatkan infrastruktur Kelurahan Benteng Sawitto sudah tepat sasaran dan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bisa dikatakan programnya sudah berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

6. Tersedianya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan yang ada secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana yang digunakan LKK Benteng Sawitto dalam proses pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak begitu banyak, tetapi itu sudah dapat menunjang kelancaran proyek yang dijalankan.

Sarana dan prasarana yang tersedia dapat di maksimalkan oleh LKK Benteng Sawitto dalam mengelola sekaligus sebagai pelaksana kegiatan pembangunan, sehingga proyek-proyek yang dikerjakan berjalan dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti.

7. Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien

Kelurahan Benteng Sawitto sebagai objek penelitian pada skripsi ini sudah menjalankan program-program secara efisien dan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang dijalankan oleh LKK juga sudah efektif.

Hal ini bisa di tunjukkan dengan sudah berjalannya program-program pembangunan yang ada tanpa mengalami kendala-kendala yang menghambat program-program pembangunan tersebut baik itu dari segi pengelolaan dananya ataupun dari segi pelaksanaan kegiatan proyeknya.

8. Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Dalam monitoring yang dilakukan oleh pihak Kecamatan telah berjalan dengan baik tanpa adanya ketidak sesuaian hasil dari pekerjaan proyek dengan RAB yang telah disepakati. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan telah berjalan dengan efektif.

Dalam hal pengendalian yang dilakukan oleh Lurah Benteng Sawitto tidak terlihat adanya kendala-kendala yang dialami oleh pelaksana kegiatan dalam mengerjakan proyek-proyek kelurahan tersebut. Bisa dikatakan bahwa proses pengawasan dan pengendalian yang dilakukan di lapangan sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa hasil keseluruhan dari efektifitas pengelolaan dana kelurahan terhadap peningkatan infrastruktur Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sudah efektif, hal ini diperoleh berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah menjelaskan tentang efektivitas pengelolaan dana kelurahan terhadap peningkatan infrastruktur di Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Peneliti menemukan bahwa proses pengelolaan dana kelurahan terhadap peningkatan infrastruktur kelurahan sudah efektif karena pelaksanaannya telah berjalan dengan baik. Pengelolaan dana kelurahan terhadap peningkatan infrastruktur di Kelurahan Benteng Sawitto telah sesuai dengan apa yang diharapkan sejak awal yaitu peningkatan pembangunan infrastruktur dan telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan hasil dari Musrenbang Kelurahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka penulis berharap agar pemerintah kelurahan Benteng Sawitto dan pihak pelaksana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan kedepannya mampu terus mempertahankan efektivitas pengelolaan dana kelurahan utamanya di bidang pembangunan, karena pelaksanaannya telah berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Zainul. 2015 . Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Dana Desa 65-66
- Bungin, Burhan, 2009, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta : Kencana. Mulyana, Deddy, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Hasibuan, M.S.P, 2003, Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Melayu S.P, 1996, Manajemen Dasar dan Masalah, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Melayu S.P, 2007, Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moleong J, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J, 2010 *Metodologi Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Siagian P. Sondang, 2002, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Soetrisno, 2001, *Pemberdayaan dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Yogyakarta : Philosophy Press.
- Sudriamunawar, Haryono. 2002. Pengantar Studi Administrasi Pembangunan. Bandung : Mandar Maju.
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D. Bandung : CV.

Alfabeta.

Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. CV

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018

Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 30 Ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan

Lainnya :

1. GramidiaBlog, "Pengertian Infrastruktur". 2021. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-infrastruktur/>. Diakses November 2022
2. KajianPustaka.Com, "https://www.kajianpustaka.com/2020/03/efektivitas-kerja.html/". Diakses Desember 2022